

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

2.1.1 Sejarah dan Pengertian PKBM

Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merupakan tindak lanjut dari gagasan *Community Learning Center* telah dikenal di Indonesia sejak tahun enam puluhan. Secara kelembagaan, perintisannya di Indonesia dengan nama PKBM baru dimulai pada tahun 1998 sejalan dengan upaya untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh layanan pendidikan (Sudjana, 2003, 2).

Manfaat kehadirannya telah banyak dirasakan oleh masyarakat. Dengan motto PKBM yaitu *dari, oleh, dan untuk masyarakat* maka masyarakat tidak lagi hanya mengikuti program-program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah melainkan juga mereka dapat merencanakan, membiayai, melaksanakan, dan menilai hasil, dan dampak program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan potensi-potensi yang terdapat di lingkungannya, sehingga masyarakatpun bertanggung jawab terhadap kegiatan PKBM tersebut.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah tempat pembelajaran dalam bentuk berbagai macam keterampilan dengan

memanfaatkan sarana, prasarana, dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat, agar masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf hidupnya (BPKB Jatim, 2000, 6).

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini merupakan salah satu alternatif yang dipilih dan dijadikan sebagai ajang proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini selaras dengan adanya pemikiran bahwa dengan melembagakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, maka akan banyak potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang selama ini belum dikembangkan secara maksimal. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diarahkan untuk dapat mengembangkan potensi-potensi tersebut menjadi bermanfaat bagi kehidupannya. Agar mampu mengembangkan potensi-potensi tersebut, maka diupayakan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di PKBM bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagai basis pendidikan bagi masyarakat perlu dikembangkan secara komprehensif, fleksibel, dan beraneka ragam serta terbuka bagi semua kelompok usia dan anggota masyarakat sesuai dengan peranan, hasrat, kepentingan, dan kebutuhan belajar masyarakat. Oleh karena itu, jenis pendidikan yang diselenggarakan dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) juga beragam sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan pembelajaran masyarakat.

2.1.2 Fungsi dan Azaz PKBM.

PKBM sebagai lembaga pendidikan yang dibentuk dan diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat, secara kelembagaan mempunyai fungsi yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

- a. Sebagai *tempat kegiatan belajar* bagi warga masyarakat, artinya tempat bagi warga masyarakat untuk menimba ilmu dan memperoleh berbagai jenis keterampilan dan pengetahuan fungsional yang dapat didayagunakan secara tepat dalam upaya memperbaiki kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.
- b. Sebagai *tempat pusaran* berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat, artinya bahwa PKBM diharapkan dapat digunakan sebagai tempat pertukaran berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat, sehingga menjadi suatu sinergi yang dinamis dalam upaya pemberdayaan masyarakat itu sendiri.
- c. Sebagai *pusat dan sumber informasi*, artinya bahwa PKBM merupakan tempat warga masyarakat untuk menanyakan berbagai informasi tentang berbagai jenis kegiatan pembelajaran dan keterampilan fungsional yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. PKBM dapat menyediakan informasi kepada anggota masyarakat yang membutuhkan keterampilan fungsional untuk bekal hidup (*life skill*).

- d. Sebagai *ajang tukar menukar* keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dengan prinsip saling membelajarkan melalui diskusi-diskusi mengenai permasalahan yang dihadapi.
- e. Sebagai tempat *berkumpulnya* warga masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, serta nilai-nilai tertentu bagi masyarakat yang membutuhkannya. disamping itu dapat juga digunakan untuk berbagai pertemuan bagi penyelenggaraan dan nara sumber baik intern maupun ekstern.
- f. Sebagai *loka belajar* yang tidak pernah berhenti, artinya PKBM merupakan suatu tempat yang secara terus menerus digunakan untuk proses belajar mengajar (BPKB Jatim, 2000, 8).

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwasanya fungsi dari PKBM dalam masyarakat sebagai proses kegiatan belajar yang bersifat non-formal untuk memudahkan masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan.

2.1.3 Proses Pembentukan PKBM

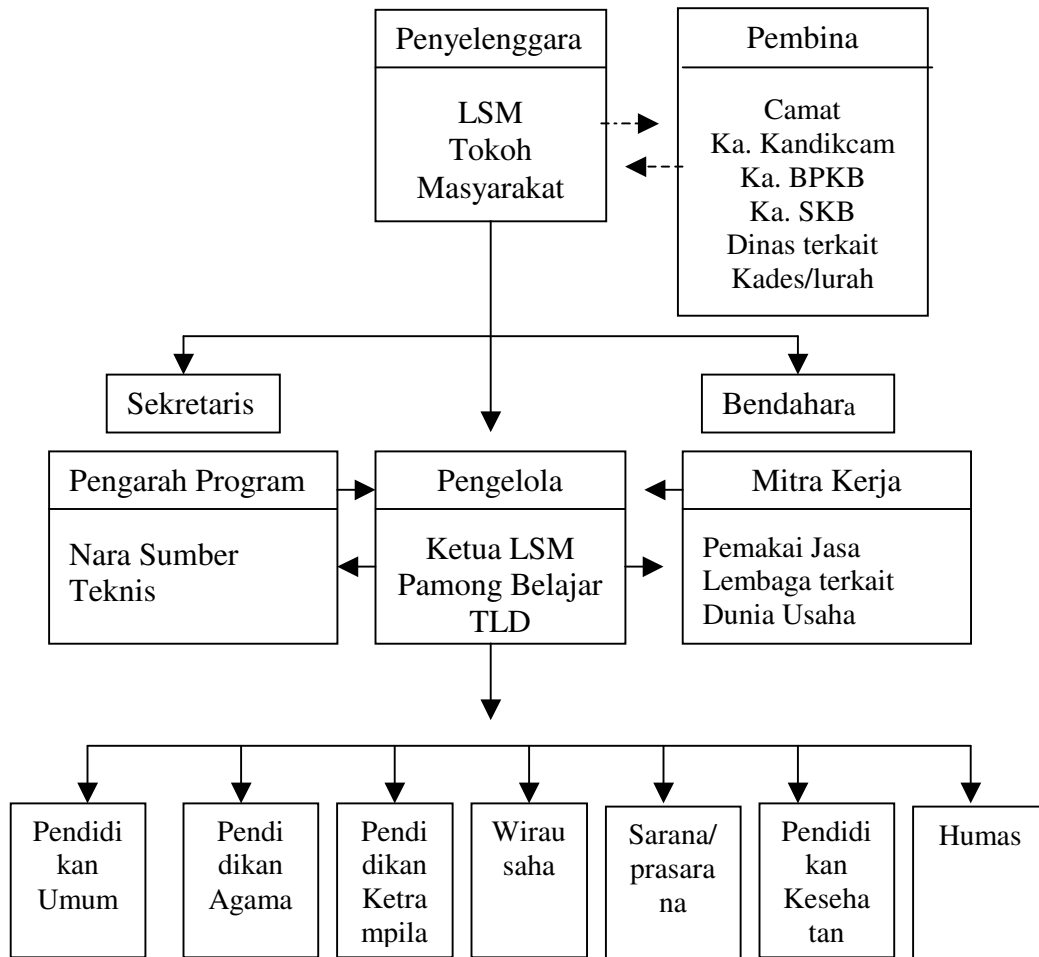
Pada prinsipnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan memperhatikan segala potensi yang ada disekitarnya. Oleh karena itu dalam proses pembentukan dan penyelenggaraannya lebih menggunakan metode/pendekatan PRA (*Partisipatory Rural Appraisal*) yang secara garis besar prinsip-prinsipnya meliputi: belajar dari masyarakat, masyarakat sebagai subyek, saling

membelajarkan, pemberdayaan masyarakat, mengenai potensi dan kesadaran, penyadaran, perumusan masalah dan penentuan prioritas, identifikasi pemecahan masalah, pemilihan alternatif pemecahan, perencanaan dan penyajian rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan supervisi, dan evaluasi (BPKB Jatim. 2000. 11).

Sebagai bentuk aplikasi prinsip-prinsip PRA tersebut, maka dalam proses pembentukan maupun penyelenggaraan pembelajaran di PKBM adalah:

- a. *Pendekatan Terhadap Masyarakat.* Pendekatan ini dapat dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai pengaruh di desa/kelurahan tersebut, misalnya kiai, ketua RT/RW, lurah/kepala desa, dll. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengakrabkan terhadap masyarakat dengan program PKBM yang akan diselenggarakan. Dalam pendekatan ini masyarakat diperkenalkan dengan berbagai masalah serta adanya potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang mungkin dapat menunjang pelaksanaan program. Pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk menentukan calon penyelenggara sendiri sesuai dengan yang diharapkan oleh warga masyarakat. Agar tugas penyelenggaraan dalam kegiatan PKBM lebih mudah, maka susunan organisasi penyelenggaraan PKBM adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi PKBM



(BPKB Jawa Timur. 2000. 13)

Gambar 1. Struktur Organisasi PKBM

Dari struktur organisasi PKBM tersebut, masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

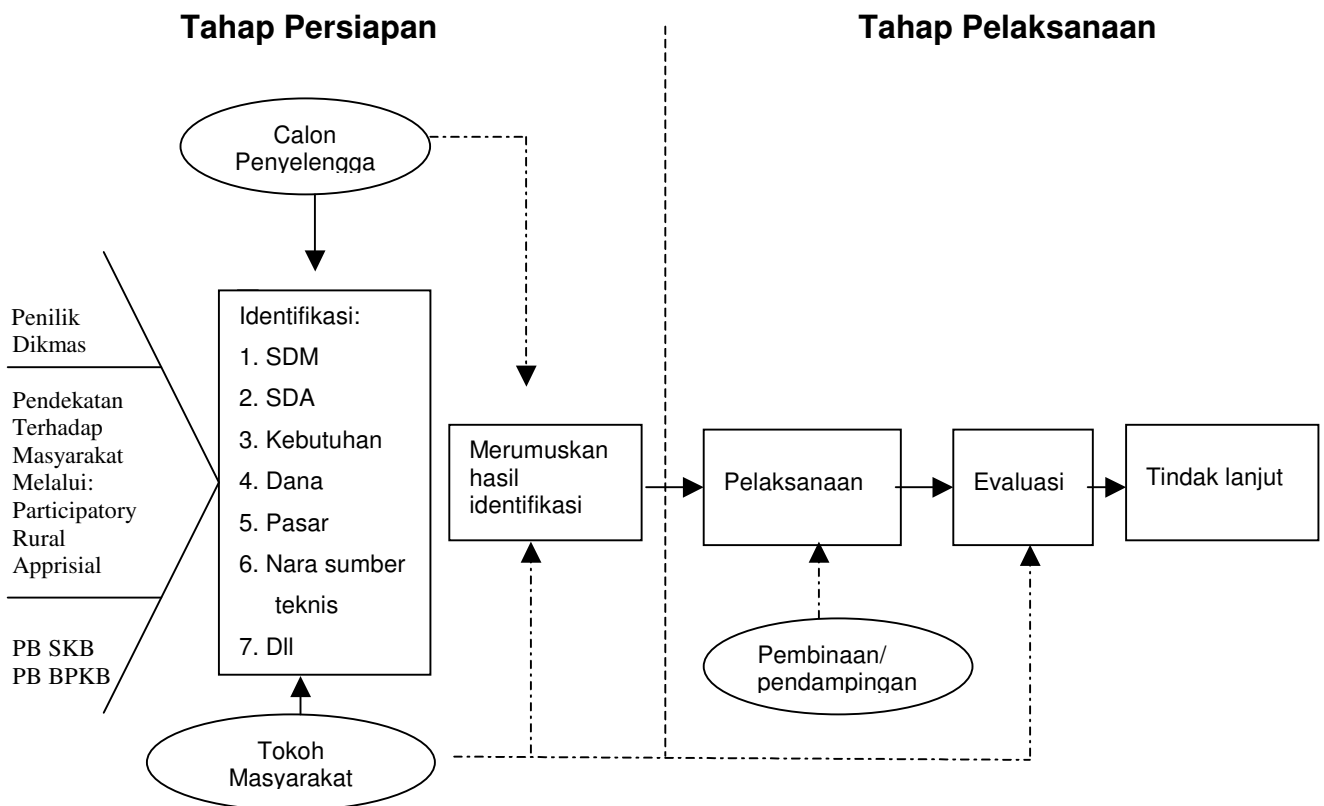
1. Tugas dan fungsi penyelenggara: menjadi penanggungjawab seluruh kegiatan yang ada di PKBM, menentukan dan menetapkan kebijakan pokok yang dilakukan oleh PKBM, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pembina.

2. Tugas dan fungsi sekretaris: melaksanakan kebijakan penyelenggaraan organisasi, mengatur kelancaran administrasi dan laporan kegiatan, menyusun surat-menyurat, mengarsip surat menyurat, mendistribusikan surat-surat, dan mengamankan inventaris.
3. Tugas dan fungsi bendahara: menerima dan membukukan keuangan, menyalurkan dana sesuai dengan kebutuhan, mengkonsultasikan pengeluaran dana, mengarsip tanda bukti keluar masuk uang, dan mengamankan uang kas.
4. Tugas dan fungsi pengelola program: penanggungjawab seluruh teknis pelaksanaan program, mengkoordinasikan, mengelola dana, dan pembina teknis pelaksanaan program.
5. Tugas dan fungsi pengelola program: merencanakan program, merumuskan kebutuhan pelaksanaan program, mengendalikan mutu program, mengevaluasi pelaksanaan dan hasil program.
6. Tugas dan fungsi mitra kerja: mencarikan peluang yang saling menguntungkan, menerima output program, dan membantu mencarikan dana usaha.
7. Tugas dan fungsi penanggungjawab program: bertanggungjawab terhadap keberhasilan program, mengevaluasi kegiatan, melaporkan hasil kegiatan, dan dan melaporkan pertanggungjawaban kepada pengelola program. (BPKB Jawa Timur. 2000. 14)

- b. *Identifikasi Kebutuhan PKBM*. Identifikasi ini dilakukan oleh calon penyelenggara dan dibantu oleh tokoh masyarakat. Unsur-unsur yang perlu diidentifikasi dalam pelaksanaan PKBM komponen-komponen pembelajaran yang antara lain meliputi: warga belajar, nara sumber/tutor, sarana belajar, tempat belajar, kelompok belajar, dana belajar, dan program belajar.
- c. *Merumuskan Hasil Identifikasi*. Tujuannya adalah untuk mengetahui prioritas utama yang harus dilakukan oleh penyelenggara bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat sebelum kegiatan pembelajaran PKBM dimulai.
- d. *Pelaksanaan Kegiatan*. Dalam pelaksanaan kegiatan PKBM hendaknya dimusyawarkan lebih dahulu dengan warga belajar untuk menentukan jadwal kegiatan belajar, sehingga pelaksanaannya tidak mengalami hambatan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif yang melibatkan lembaga-lembaga terkait dan masyarakat.
- e. *Evaluasi*. Kegiatan evaluasi PKBM hendaknya dilakukan oleh penyelenggara dan tokoh-tokoh masyarakat di sekitar PKBM. Disamping untuk mengetahui keberadaan PKBM ada hal yang paling penting untuk dibicarakan dengan tokoh-tokoh masyarakat tentang kendala/hambatan yang ditemui selama pelaksanaan PKBM dan sekaligus bagaimana cara pemecahannya (BPKB Jatim. 2000; 21).

2.1.4 Alur Pembentukan PKBM

Alur pembentukan PKBM terdiri atas dua tahap, yaitu tahap persiapan pembentukan dan tahap pelaksanaan PKBM. Secara skematis, dapat digambarkan pada alur bagan di bawah ini:



(BPKB Jawa Timur. 2000. 15)

Gambar 2. Alur Pembentukan PKBM

Dari alur bagan pembentukan PKBM di atas, maka dapat dijelaskan bahwasanya pada awal perencanaan sampai penyelenggaraan PKBM akan melibatkan instansi pemerintah (penilik Dikmas, Pamong Belajar SKB dan BPKB) maupun dari tokoh-tokoh masyarakat.

2.2. Pendampingan.

2.2.1 Pengertian Pendampingan.

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Kata pendampingan lebih bermakna pada kebersamaan, kesejajaran, samping menyamping, dan karenanya kedudukan antara keduanya (pendamping dan yang didampingi) sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan. Hal ini membawa implikasi bahwa peran pendamping hanya sebatas pada memberikan alternatif, saran, dan bantuan konsultatif dan tidak pada pengambilan keputusan (BPKB Jawa Timur. 2001; 5).

Pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan kelompok. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri.

Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya

kesadaran sebagai manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

2.2.2 Peran Pendamping

Kelompok perlu didampingi karena mereka merasa tidak mampu mengatasi permasalahan secara sendirian dan pendamping adalah mendampingi kelompok. Dikatakan mendampingi karena yang melakukan kegiatan pemecahan masalah itu bukan pendamping. Pendamping hanya berperan untuk memfasilitasi bagaimana memecahkan masalah secara bersama-sama dengan masyarakat, mulai dari tahap mengidentifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan masalah, sampai pada implementasinya.

Dalam upaya pemecahan masalah, peran pendamping hanya sebatas pada memberikan alternatif-alternatif yang dapat diimplementasikan. Dan kelompok pendampingan dapat memilih alternatif mana yang sesuai untuk diambil. Pendamping perannya hanya sebatas memberikan pencerahan berfikir berdasarkan hubungan sebab akibat yang logis, artinya kelompok pendampingan disadarkan bahwa setiap alternatif yang diambil senantiasa ada konsekuensinya. Diharapkan konsekwensi tersebut bersifat positif terhadap kelompoknya.

Dalam rangka pendampingan ini, hubungan yang dibangun oleh pendamping adalah hubungan konsultatif dan partisipatif. Dengan adanya

huubngan itu, maka peran yang dapat dimainkan oleh pendamping dalam melaksanakan fungsi pendampingan adalah:

- a. *Peran Motivator.* Upaya yang dilakukan pendamping adalah menyadarkan dan mendorong kelompok untuk mengenali potensi dan masalah, dan dapat mengembangkan potensinya untuk memecahkan permasalahan itu.
- b. *Peran Fasilitator.* Pendamping mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan, mengkondisikan iklim kelompok yang harmonis, serta memfasilitasi terjadinya proses saling belajar dalam kelompok.
- c. *Peran Katalisator .* pendamping dalam hal ini dapat melakukan aktivitas sebagai penghubung antara kelompok pendampingan dengan dengan lembaga di luar kelompok maupun lembaga teknis lainnya, baik lembaga teknis pelayanan permodalan maupun pelayanan keterampilan berusaha dalam rangka pengembangan jaringan (BPKB Jawa Timur, 2001; 8)

Peran-peran pendamping tersebut hanya akan dapat dilaksanakan secara maksimal jika pendamping memahami kelompok yang didampinginya, karena itu pendamping diupayakan dapat hadir di tengah mereka, hidup bersama mereka, belajar dari apa yang mereka miliki, mengajar dari apa yang mereka ketahui, dan bekerja sambil belajar.

Ketika pendamping ikut terlibat di dalam proses penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat dengan memainkan peran-peran tersebut, maka secara tidak langsung upaya untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi

program-program pembelajaran PKBM dapat berlangsung. Dengan demikian komponen-komponen yang terlibat dalam proses penyelenggaraan kegiatan pembelajaran akan dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Dalam proses pendampingan di PKBM, yang mempunyai peran secara intensitas adalah pengelola dan tutor karena secara langsung dan setiap waktu bertemu dengan warga belajar sebagai sasaran kegiatan pembelajaran di PKBM.

2.2.3 Pendampingan Tutor di PKBM

Tutor merupakan pelaksana utama di dalam proses pembelajaran program di PKBM. Tugas tutor tidak hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran kepada warga belajar sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Agar proses pembelajaran berjalan secara kontinyu dan warga belajar mempunyai motivasi untuk mengikuti proses pembelajaran secara aktif, maka tutor dituntut untuk berperan sebagai pendamping bagi warga belajar. Hal ini perlu dilakukan oleh tutor, karena karakteristik warga belajar yang mengikuti proses pembelajaran di PKBM yang sebagian besar adalah mengalami keterbatasan dan kekurangan. Keterbatasan dan kekurangan tersebut menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah formal (SD sampai SMU).

Pendampingan tutor kepada warga belajar dengan peran-peran yang ada, dapat dikelompokkan ke dalam tiga hal, yaitu:

- a. Peran motivator dalam pendampingan yang berkaitan dengan upaya membangkitkan motivasi belajar warga belajar untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas, memotivasi warga belajar untuk menghadiri proses pembelajaran, dan memotivasi warga belajar untuk aktif menyelesaikan tugas-tugas dan evaluasi yang diberikan oleh tutor.
- b. Peran fasilitator dalam pendampingan yang berkaitan dengan menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh warga belajar dalam proses pembelajaran.
- c. Peran katalisator dalam pendampingan yang diwujudkan dalam proses evaluasi hasil belajar dan warga belajar akan memperoleh manfaat dari evaluasi hasil belajar tersebut.

Peran-peran tutor dalam proses pendampingan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulan bagi warga belajar dalam PBM di PKBM.

2.3. Motivasi Belajar.

2.3.1 Pengertian Motivasi

Ada beberapa pengertian motivasi yang disampaikan oleh para ahli. Menurut A. Tabrani Rusyam yang memberikan pengertian: "Motivasi merupakan penggerak tingkah laku ke arah suatu tujuan dengan didasari oleh adanya suatu keinginan/kebutuhan." (A. Tabrani Rusyam, 1989. 99)

Sedangkan Wahjosumidjo memberikan suatu definisi: “Motivasi adalah suatu proses psikologi yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang untuk bertindak laku dalam rangka memenuhi kebutuhan yang dirasakan.” (Wahjosumidjo, 1987. 174)

Sedangkan Gerungan menambahkan bahwa motivasi adalah penggerak, alasan-alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan dirinya melakukan suatu tindakan/bertingkah laku. (Gerungan, 1991, 140).

Berdasarkan pada beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan suatu penggerak atau dorongan-dorongan yang terdapat dalam diri manusia yang dapat menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah lakunya. Hal ini terkait dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani

Dalam kaitannya dengan kegiatan belajar, maka motivasi belajar berarti keseluruhan daya penggerak di dalam diri para siswa/warga belajar/peserta didik yang dapat menimbulkan, menjamin, dan memberikan arah pada kegiatan belajar, guna mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Dengan motivasi belajar, maka siswa/warga belajar/peserta didik dapat mempunyai intensitas dan kesinambungan dalam proses pembelajaran/pendidikan yang diikuti.

2.3.2 *Sifat-sifat Motivasi*

Menurut Martin Handoko seperti yang dikutip oleh TIM MKDK IKIP Surabaya, sifat-sifat motivasi terdiri atas:

- a. Motivasi Instrinsik, yaitu motivasi yang berfungsinya tidak usah dirangsang dari luar, karena memang dalam diri individu tersebut sudah ada dorongan untuk melakukan tindakan.
- b. Motivasi Ekstrinsik, yaitu motivasi yang berfungsinya karena disebabkan oleh adanya faktor pendorong dari luar diri individu. (Tim MKDK IKIP Surabaya, 1995. 87)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa timbulnya motivasi yang dapat menyebabkan seseorang menggerakkan tingkah lakunya karena adanya motivasi dari dalam dirinya. Motivasi ini lebih dipengaruhi oleh upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Di samping itu juga karena adanya dorongan dan tuntutan serta pengaruh dari lingkungan luar untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

2.3.3 *Jenis-jenis Motivasi*

Jenis-jenis motivasi yang terjadi atas dasar pembentukannya menurut Sardiman terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Motivasi bawaan, yaitu motivasi yang dilatarbelakangi oleh fisio kemis di dalam tubuh seseorang yang telah dibawah sejak lahir dan terjadinya tanpa dipelajari.

- b. Motivasi yang dipelajari, yaitu motivasi yang terjadi karena adanya komunikasi dan isyarat sosial serta secara sengaja dipelajari oleh manusia (Sardiman. 1992. 86)

Motivasi bawaan atau disebut juga dengan motivasi primer terjadi dengan sendirinya tanpa melalui proses belajar, sedangkan motivasi yang dipelajari atau motivasi sekunder muncul melalui proses pembelajaran sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman seseorang.

2.3.4 Pentingnya motivasi dalam kegiatan pembelajaran

Salah satu prinsip utama dalam kegiatan pembelajaran adalah siswa/peserta didik mengambil bagian atau peranan dalam dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan untuk itu peserta didik/warga belajar harus mempunyai motivasi belajar sehingga dengan mempunyai motivasi belajar yang kuat, warga belajar akan menunjukkan minat, aktivitas, dan partisipasinya dalam proses pembelajaran yang diikutinya. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, motivasi mempunyai beberapa manfaat, antara lain:

- a. Motivasi dapat memberi semangat terhadap peserta didik/warga belajar dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.
- b. Motivasi perbuatan merupakan pemilih dari tipe kegiatan di mana seseorang berkeinginan untuk melakukan kegiatan tersebut.
- c. Motivasi dapat memberi petunjuk pada tingkah laku belajar.

- d. Motivasi dapat menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan pembelajaran warga belajar.
- e. Motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong dalam usaha pencapaian prestasi dan hasil belajar yang diharapkan. (Tim MKDK IKIP Surabaya, 1995. 81)

Dengan demikian motivasi mempunyai peranan dan manfaat yang sangat penting dalam kelangsungan dan keberhasilan belajar yang dilaksanakan oleh setiap individu. Hal ini berarti semakin tinggi motivasi belajar yang dimiliki individu, maka akan semakin tinggi/besar pula prestasi dan hasil belajar yang akan dicapai.

Unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar antara lain meliputi: cita-cita, kemampuan warga belajar, kondisi warga belajar, dan suasana lingkungan belajar. Dengan adanya cita-cita, maka seseorang akan mempunyai arah dan tujuan yang mampu mengkonsolidasikan seluruh pikiran dan perasaan serta tindakannya mengarah kepada terwujudnya suatu keinginan. Kemampuan warga belajar merupakan kemampuan intelektual akademik yang dimiliki oleh warga belajar yang digunakan untuk mengolah dan memproses informasi yang diperoleh menjadi pengetahuan. Kondisi warga belajar yang meliputi kondisi fisik, psikis, dan indera yang akan mempengaruhi diri dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan.

2.3.5 Motivasi Belajar Warga Belajar di PKBM

Motivasi belajar bagi warga belajar merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Warga belajar yang mengikuti proses belajar mengajar di PKBM dan lembaga-lembaga pendidikan luar sekolah pada umumnya, mempunyai motivasi belajar yang di latarbelakangi oleh adanya keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada dirinya. Keterbatasan ekonomi menyebabkan mereka tidak mampu mengikuti/mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan formal. Selain itu, pada umumnya mereka juga melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi di sektor informal (buruh pabrik, pekerja kasar, dan lainnya).

Proses belajar mengajar di PKBM yang diselenggarakan pada malam hari lebih di dasarkan pada pemberian kesempatan kepada warga belajar untuk dapat mengikutinya. Diharapkan motivasi belajar warga belajar tetap meningkat dengan adanya kesempatan belajar pada malam hari. Berdasarkan pada teori motivasi belajar, maka motivasi belajar warga belajar untuk mengikuti proses pembelajaran di PKBM dapat dikelompokkan ke dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk memperoleh legalitas formal (ijazah) pendidikan

Keinginan belajar warga belajar di PKBM hal ini lebih didasarkan pada orientasi untuk memperoleh ijazah sebagai bentuk pengakuan formal atas proses belajar yang diikutinya di PKBM.

Warga belajar Kejar Paket A mengharapkan dapat memperoleh ijazah lulus Kejar Paket A sehingga dapat melanjutkan ke jenjang Kejar Paket B. Warga belajar Kejar Paket B mengharapkan dapat memperoleh ijazah lulus Kejar Paket c sehingga dapat melanjutkan ke jenjang Kejar Paket C. Juga warga belajar Kejar Paket C mengharapkan dapat memperoleh ijazah lulus Kejar Paket C sehingga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Implikasi dari diperolehnya ijazah dari kelompok belajar yang diikuti oleh warga belajar di PKBM secara ekonomi lebih mengarah pada adanya peningkatan penghasilan. Bagi warga belajar yang bekerja di perusahaan/pabrik yang hanya memiliki ijazah sekolah dasar dituntut untuk memiliki ijazah yang lebih tinggi (SLTP/SMU) jika ingin memperoleh peningkatan pendapatan, dan begitu juga seterusnya. Ketika ada tuntutan semacam itu, sementara kesempatan untuk meningkatkan pendidikan hanya tersedia pada saat jeda kerja (malam/sore hari), maka upaya itu dapat dilakukan dengan mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di PKBM (Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C).

Seiring dengan upaya pemerintah dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, maka hal ini menjadi dasar dan dorongan warga belajar yang hanya mempunyai bekal pendidikan lulusan dari sekolah dasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengikuti pendidikan di Kejar Paket B dan Kejar Paket C (BPKB Jatim, 2000: 37).

b. Keadaan pasif

Warga belajar yang mengikuti program pembelajaran di PKBM sebagian besar adalah sudah bekerja terutama pada sektor-sektor informal. Sebagian besar waktunya pada siang hari dipergunakan untuk aktivitas-aktivitas ekonomi, sehingga di malam hari menyebabkan kondisinya cukup payah dan mengurangi konsentrasi untuk belajar.

Warga belajar dalam mengikuti proses pembelajaran di PKBM tidak diberikan peraturan apapun yang sifatnya mengikat. Peraturan dan tata tertib yang terjadwal seperti halnya di sekolah formal kadangkala tidak diterapkan dalam proses pembelajaran. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya konsekwensi apapun bagi warga belajar dalam mengikuti proses pembelajaran. Ketika warga belajar yang secara rutin, rajin, dan aktif mengikuti proses pembelajaran hal itu lebih didasarkan oleh keinginan dari dalam dirinya untuk meningkatkan pendidikannya, sementara yang lain juga menganggap hanya sekedar dating untuk memenuhi jadwal belajar yang telah disusun oleh tutor dan pengelola PKBM.

c. Keterbelakangan belajar

Tidak bias dipungkiri bahwasanya sebagai besar warga belajar yang menjadi sasaran layanan pendidikan di lembaga pendidikan luar sekolah adalah warga masyarakat yang miskin dan terpinggirkan oleh sistem yang ada. Kemiskinan menyebabkan masyarakat tidak bisa mengikuti proses pembelajaran di sekolah formal yang menerapkan biaya

pendidikan yang mahal. Hal ini juga berimplikasi pada rendahnya motivasi dalam proses pembelajaran. Kekurangan motivasi dan keterbelakangan belajar terjadi karena konsentrasi mereka lebih kepada aktivitas-aktivitas ekonomi untuk memperoleh penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan fisik hidupnya.

d. Sikap mengalah

Warga belajar yang mengikuti proses pembelajaran di PKBM menganggap bahwa proses pembelajaran yang dikuti sebagai bentuk rutinitas belajar. Kesadaran untuk belajar dilatar belakangi oleh keinginan untuk memperoleh ijazah agar dapat memperoleh kesempatan melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Tuntutan dari tempat kerja untuk meningkatkan pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan penghasilan juga bagian dari kesadaran untuk belajar.

2.4. Pemberdayaan.

2.4.1 Definisi Pemberdayaan

Awal munculnya konsep pemberdayaan (*empowerment*) dimulai pada awal abad ke 20 disebabkan karena adanya ketidakpuasan. Konsep pembangunan nasional yang sejatinya berorientasi pada pertumbuhan, pemerataan, dan kesejahteraan rakyat namun dalam kenyataannya, hasil pembangunan tersebut hanya dinikmati oleh sebagian kecil golongan tertentu

saja, sehingga dampak yang muncul adalah: ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran.

Yang menjadi obyek pemberdayaan adalah sumber daya manusia yang meliputi SDM: individu dan keluarga (SDM mikro), serta komunitas dan masyarakat (SDM makro). SDM tersebut bisa terdapat di lingkungan organisasi pemerintah, organisasi politik, dunia usaha, dan lingkungan sosial lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan antara lain meliputi: obyek yang diberdayakan, sasaran materiil, dan sasaran formal, desain pemberdayaan, subyek pemberdayaan, materi pemberdayaan, budaya pemberdayaan, struktur pemberdayaan, dan iklim pemberdayaan.

Proses Pemberdayaan yang dapat dilakukan antara lain melalui upaya-upaya dengan: (1) Pendekatan sosial yang mengarah kepada terjadinya perubahan sosial dengan berusaha menciptakan kondisi sekarang dan akan datang untuk menjadi lebih baik, subsidi, beasiswa, sasaran dan fungsi sosial, serta perilaku sosial dan dengan terjadi proses perubahan sosial, baik dalam fungsional maupun kelembagaan sosial. (2) strategi perubahan masyarakat, dengan langka-langkah: identifikasi situasi dan kondisi, perumusan masalah, analisis pengalaman, pengorganisasian pengalaman, penguatan berkelanjutan, dan pengorganisasian berkelanjutan. (3) intervensi, berupa tindakan: aksi ekonomi pada masyarakat lokal, membangun lingkungan sosial, dan kebijakan sosial melalui program-program sosial. Dan

(4) Konsumsi, yang sifatnya pemberdayaan sementara berupa pemberian: hadiah, beasiswa, dan uang, atau materi yang lain (Priyono. 1996. 63).

Dalam proses pembangunan, konsep pemberdayaan bahkan memiliki perspektif yang lebih luas. Pearse dan Stiefel misalnya, mengatakan bahwa menghormati kebhinekaan, kekhasan lokal, *dekosentrasi* kekuasaan, dan peningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatif. Paul menyatakan, bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuatan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Dalam perspektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamatan akses terhadap sumberdaya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan (Priyono. 1996. 63).

2.4.2 Pola Pemberdayaan

Secara umum, pola/konsep pemberdayaan masyarakat terdapat 4 (empat) macam perspektif, yaitu:

- a. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari *perspektif pluralis*, yaitu suatu proses untuk menolong individu dan masyarakat yang kurang beruntung untuk bersaing secara lebih efektif, dengan jalan membantu mereka untuk belajar dalam melobi dan memahami bagaimana bekerjanya sistem. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengajarkan

kelompok atau individu agar dapat bersaing dalam peraturan dengan kompetensi yang dimiliki.

- b. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari *perspektif elitist*, yaitu suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi para elitis, membentuk aliansi dengan elitis, melakukan konfrontasi dan mencari perubahan pada elitis.
- c. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis, adalah suatu agenda yang lebih menantang dan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminir.
- d. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari *perspektif post-strukturalis*, adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas aksi, atau upaya pengembangan pengertian terhadap pengembangan pemikiran baru, analitis, dan pendidikan, dari pada usaha aksi (Papilaya, 2001, 55).

Berdasarkan pada pola perspektif tersebut, maka ada dua kecenderungan pola strategi pemberdayaan masyarakat, yaitu: *Pertama*, strategi pemberdayaan atas inisiatif dari atas (*top down*), yang dilakukan dengan pola penyeragaman strategi atau distorsi terhadap keanekaragaman sistem sosial budaya lokal, umumnya berupa program-program pemberdayaan dari pemerintah, seperti: Proyek Peningkatan Pendapatan Petani, dan nelayan kecil (P4K), Takesra/Kukesra, Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Belajar Usaha (KBU), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), dan sebagainya. *Kedua*, strategi pemberdayaan

masyarakat berbasis sistem sosial budaya lokal (*bottom-up*). Strategi ini berorientasi pada upaya menggali, mengembangkan, membangkitkan, dan mengaktualisasikan potensi lokal yang ada di masyarakat yang kemudian diubah menjadi gagasan-gagasan strategis. Strategi ini menekankan pada upaya menggali, mengembangkan, membangkitkan, dan mengaktualisasikan potensi lokal yang ada di masyarakat yang kemudian diubah menjadi gagasan-gagasan strategis (Hukmat. 2001; 56).

2.4.3 Pola Pemberdayaan di Bidang Pendidikan

Pada hakekatnya proses pemberdayaan di bidang pendidikan merupakan pendekatan secara holistik yang meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, sistem belajar mengajar, institusi atau lembaga pendidikan dengan segala sarana dan prasarana pendukungnya. Dengan mengacu pada definisi tersebut di atas, pemberdayaan pendidikan diartikan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik yang diselenggarakan bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok masyarakat.

Pengembangan dan perluasan pendidikan formal yang berkualitas dan mampu mencakup seluruh lapisan masyarakat guna mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan terutama pendidikan dasar, menengah,

tinggi, dan pelatihan-pelatihan lainnya merupakan kebijaksanaan yang penting dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Pendidikan nonformal pada umumnya merupakan jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat guna meningkatkan kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh peserta didik dari lingkungan pendidikan formal ke dalam lingkungan pekerjaan praktis di masyarakat. Dengan perkataan lain, pendidikan nonformal merupakan program sosialisasi jenis-jenis keterampilan kerja praktis sesuai dengan kebutuhan masyarakat umumnya, dan industri pada khususnya. Sebagai jalur pendidikan luar sekolah, pendidikan dan pelatihan ini pada umumnya berupa kursus-kursus, dan biasanya diselenggarakan oleh swasta maupun instansi pemerintah seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Industri, Departemen Pertanian, dan Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil.

Selama ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan program kejar Paket A dan Paket B di pedesaan dan daerah pinggiran. Melalui program ini masyarakat dilatih untuk bekerja sambil belajar membaca, menulis, dan berhitung. Di samping organisasi kemasyarakatan, LSM juga dilibatkan sebagai mitra kerja dari instansi pemerintah yang memiliki program pendidikan dan pelatihan keterampilan masyarakat. Dengan demikian, program ini menjadi satu gerakan dalam

upaya meningkatkan sumber daya manusia secara keseluruhan melalui proses pendidikan.

Masalah pendidikan sebagai sarana pemberdayaan berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang pada hakekatnya merupakan strategi pemberdayaan kolektif yang meliputi pemerataan kesempatan, relevansi, kualitas, efisiensi pendidikan, tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, dan pembiayaan pendidikan yang memadai (Priyono. 1996. 73).

Strategi pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan meliputi tiga arti, yaitu:

a. Persamaan kesempatan (*equality of opportunity*)

Penyelenggaraan pendidikan diupayakan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat tanpa memandang adanya perbedaan situasi dan kondisi yang ada. Seluruh lapisan warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan.

b. Akseibilitas

Lembaga pendidikan yang ada (baik yang diselenggarakan pemerintah maupun oleh masyarakat) hendaknya dapat memberikan akses dan peluang bagi masyarakat sehingga dengan mudah dapat memperoleh layanan pendidikan tersebut. Akses tersebut berupa pemberian kemudahan dan biaya pendidikan yang murah yang terjangkau oleh kemampuan masyarakat.

c. Keadilan atau kewajaran (*equity*)

Sedangkan keadilan mengandung implikasi adanya "perbedaan" perlakuan menurut kondisi internal dan eksternal peserta didik. Dalam arti, adalah adil dan wajar (secara etis-moral) jika peserta didik diperlakukan menurut kemampuan, bakat, dan minatnya. Adalah adil pula jika demi membuka akses dan pemerataan kesempatan, peserta didik dari daerah-daerah tertentu yang prestasinya menonjol juga diberi peluang yang sama untuk mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi, meskipun sebenarnya prestasi mereka mungkin lebih rendah dibandingkan dengan prestasi belajar peserta didik dari daerah lain. Hal ini berlaku untuk mengangkat status anak-anak yang kurang beruntung.

Akan tetapi dalam kenyataannya, kemampuan belajar setiap orang berbeda sesuai dengan prinsip "perbedaan individual", sehingga meskipun terdapat peluang yang sama, akan selalu ada perbedaan perolehan hasil belajar peserta didik.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pencapaian belajar (hasil belajar) peserta didik berbeda-beda menurut faktor sosiogeografis. Karena alasan ini, maka ekualitas saja tidak cukup, dan perlu dilengkapi dengan aksesibilitas dan ekuitas. Aksesibilitas berarti bahwa setiap orang mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Untuk menunjang aksesibilitas dan ekualitas,

maka perlu ada ekuitas yang lebih merujuk pada dimensi vertikal dari pendidikan (Priyono. 1996. 75).

Implementasi pemerataan kesempatan pendidikan terlihat dari upaya pemerintah yang sejak tahun 1984 telah mencanangkan wajib belajar bagi anak-anak usia 6 atau 7 tahun ke atas, dan sejak 20 Mei 1984 pemerintah telah mencanangkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi semua warga negara. Undang-undang No. 02 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 13 ayat 1 menjelaskan: "Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan kemampuan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah".

2.5. Pendampingan Tutor pada Warga Belajar di PKBM

Pendampingan yang dimaksud merupakan kegiatan membantu kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan berdasarkan hasil interaksi antara pengelola dan anggota kelompok yang diarahkan bagi terwujudnya kerangka berfikir yang dinamis, kreatif dan aktif kepada kelompok dalam rangka mengembangkan kegiatan/proses pembelajaran. Untuk itulah pembinaan yang sungguh-sungguh di sektor inilah sangat perlu dilakukan, mungkin dalam tahap awal kegiatan usaha kelompok, termasuk pengisian buku administrasi dibiarkan saja apa adanya, semampu mereka

berdasar pada tingkat pemahamannya. Secara bertahap, lewat kegiatan pendampingan yang intensif diadakan penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan aturan yang ada. Upaya pendampingan kelompok merupakan salah satu strategi pendekatan dalam mensukseskan program-program yang diluncurkan oleh pemerintah (dalam hal ini Ditjen Diklusepa,Depdiknas).

Dalam kaitannya dengan proses pendampingan terhadap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, upaya peningkatan mutu program PKBM dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*), dapat digambarkan pada gambar berikut:



(BPKB Jatim. 2002: 23)

Gambar 3. *Evaluasi PKBM Model CIPP*

Dari gambar model evaluasi di atas diuraikan bahwa proses penyelenggaraan program pembelajaran di PKBM yang kesemuanya diawali dengan proses identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Hasil identifikasi kebutuhan belajar menjadi dasar dalam menyusun perencanaan program serta menentukan komponen-komponen proses pembelajaran program PKBM. Terjadinya proses pembelajaran program-program di PKBM tentunya harus diikuti dengan proses pendampingan sebagai bagian dari penguatan dan menjamin keberlangsungan proses pembelajaran tersebut. Pendampingan dapat dilakukan oleh pengelola maupun para tutor.

Proses pendampingan pada penyelenggaraan PKBM lebih dominan pada penyelenggaraan proses penyelenggaraan program-program PKBM. Dengan demikian, peran yang dimainkan oleh pendamping dalam penyelenggaraan PKBM adalah:

- a. Sebagai mitra, yaitu menjadi tempat konsultasi terhadap permasalahan yang bersifat teknis pada proses pembelajaran, mengingat kemampuan pengelola/penyelenggara program-program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat terutama pada pengadaan/penyediaan sarana dan dana belajar yang masih terbatas.
- b. Membantu dalam pengadaan sarana belajar, disini keberadaan pendamping, disamping membina dan aktif memotivasi kelompok, juga membantu dalam pengadaan sarana belajar.

- c. Nara Sumber Teknis. Sesuai dengan tugasnya, disamping melaksanakan kegiatan pendampingan, juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam mengadakan kegiatan lain.
- d. Pengelola. Pengelola melaksanakan pendampingan secara berkala sebagai bahan evaluasi dan pembinaan selanjutnya. Sedangkan pendamping utama dalam proses pembelajaran adalah tutor/fasilitator.
- e. Penyanggah dana. Perannya disini lebih pada kegiatan monitoring untuk melihat perkembangan usaha kelompok kaitannya dengan pemanfaatan dana bantuan yang telah diberikan sebagai modal/pendanaan untuk memperlancar proses pembelajaran.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, paling tidak seorang pendamping diharapkan mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. Jujur dan terbuka,

Pendamping haruslah jujur dalam memberikan pembinaan kepada komponen-komponen pelaksana (subyek PKBM), harus berani mengatakan bahwa kelompok tersebut salah dalam menyelesaikan pekerjaan, malas dalam mengembangkan/meningkatkan proses belajar dan lainnya. Teguran tersebut perlu diberikan demi kemajuan dan perkembangan kelompok. Pendamping juga harus terbuka menerima kritik dan saran dari anggota kelompok serta bersikap adil dalam memberikan pembinaan.

b. Memiliki Dedikasi,

Pendamping harus memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya, mau mendengarkan keluhan yang dialami oleh kelompok dengan penuh kesabaran, mampu menumbuhkan motivasi antar kelompok untuk berprestasi sebaik mungkin, dengan kata lain pendamping mampu mendorong dan menumbuhkan semangat untuk berkarya.

c. Komunikatif

Secara umum komunikasi mengandung pengertian memberikan informasi, pesan, gagasan, ide, pikiran kepada orang lain dengan maksud agar orang lain berpartisipasi, yang pada akhirnya informasi, pesan, gagasan, ide, pikiran tersebut menjadi milik bersama antara komunikator dan komunikan (Karti soeharto, 1995). Pendamping hendaknya pandai berkomunikasi dengan anggota kelompok dalam rangka menjalin kerja sama antar kelompok. Dalam hal ini pendamping harus pandai membuat suasana yang kondusif untuk terciptanya peluang kerja sama dalam menyelesaikan tugas, mengingat masing-masing kelompok, kemampuan dan ketrampilannya masih terbatas. Dengan terciptanya komunikasi ini keberadaan kelompok akan mudah terpantau perkembangannya dan masing-masing anggota kelompok akan semakin akrab. Dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, diharapkan pendamping bisa lebih tahu perasaan/isi hati dan kemauan/harapan dari anggota kelompok dan

bisa menumbuhkan sikap partisipatif, sehingga pendamping bisa menentukan bantuan apa yang diperlukan oleh anggota kelompok.

d. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan

Dalam melakukan pembinaan, tentunya akan dijumpai bermacam permasalahan yang masing-masing kelompok tidaklah sama. Untuk itu pendamping hendaknya bisa membantu mengatasi permasalahan yang ada, melalui saran dan alternatif pemecahan serta bisa menghubungkan dengan Nara Sumber Teknis maupun mitra kerja lainnya yang ada kaitannya dengan upaya mengefektifkan proses pembelajaran di PKBM.

e. Akrab dan Santai

Dalam melakukan tugas pembinaan, pendamping harus fleksibel dan tidak memaksakan diri, agar aktivitas pembelajaran tidak terganggu. Untuk menjaga agar keberadaan PKBM bisa terus berkembang. Hal ini mengingat bahwa kegiatan pembinaan yang dilaksanakan secara drastis, justru akan menimbulkan kemacetan pada aktivitas mereka, bahkan yang paling fatal, kelompok bisa bubar karena merasa apa-apa yang dikerjakan dinilai salah oleh pendamping, karena sikap mentalnya belum siap menerima perubahan. Hal ini terkait dengan latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi dari anggota kelompok.

Kusnadi dalam bukunya mengatakan, bahwa harus diakui, walaupun pembangunan masyarakat lebih menitik beratkan pada pengembangan inisiatif dan kreativitas dari dalam, pada tingkat tertentu tidak menutup

kemungkinan adanya bantuan, pengarahan dan motivasi dari luar (Kusnadi, 1995, 32). Untuk kegiatan pembelajaran di PKBM, kegiatan pendampingan dilakukan mulai pada tahap perencanaan untuk mendirikan PKBM. Hal ini mengingat, biasanya pada tingkat awal usaha, campur tangan dari luar (baca: pendamping) justru sangat dibutuhkan. Pendampingan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan memfasilitasi dalam pengadaan prasarana pembelajaran. Disamping itu, peran dan keterlibatan tokoh masyarakat diupayakan untuk membantu dalam memotivasi warga masyarakat agar mempunyai motivasi untuk mengikuti proses pembelajaran di PKBM. Sedangkan ketika mereka sudah mulai melakukan proses belajar mengajar (proses pemandirian), kegiatan pendampingan hanya dilakukan secara berkala. Dengan demikian, keberadaan seorang pendamping lebih banyak bersifat sebagai motivator yang tidak menggurui, seorang pendamping harus mengetahui kemampuan dan aktivitas dari masing-masing kelompok.

Strategi pendampingan yang dapat dilakukan dalam program ini adalah melalui pendekatan individu dan kelompok dalam rangka membantu mengatasi permasalahan yang timbul maupun dalam upaya mengembangkan dan kontinuitas program-program di PKBM. Dengan demikian akan memudahkan dalam melakukan pembinaan, serta selalu mengikuti perkembangan dan bisa menjaga keutuhan kelompok. Pendamping hanya dapat memberi pandangan-pandangan, saran dan

alternatif untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam rangka upaya mengefektifkan penyelenggaraan PKBM.

Bahwasanya pendampingan pada penyelenggaraan proses pembelajaran tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja. Keterlibatan berbagai komponen (pemerintah dan masyarakat) untuk memainkan peran pendampingan sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator akan sangat potensial untuk mengefektifkan penyelenggaraan serta menuju pemberdayaan program-program PKBM.

Proses pendampingan PKBM dengan menganut model Context, Input, Process, dan Product yang efektif dengan indikator-indikator yang selaras dengan pencapaian tujuan proses pembelajaran masing-masing program yang diselenggarakan oleh PKBM. Keterlibatan pendamping tidak lebih dari sebatas untuk mengupayakan/membantu mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masing komponen yang ada pada program-program PKBM. Jadi manakala peran dan fungsi tersebut dapat dimainkan dan adanya fasilitasi dari pendamping, maka penyelenggaraan PKBM yang efektif dan mengarah pada pemberdayaan, akan bisa tercapai.

Keterlibatan tutor/fasilitator dalam mendampingi kegiatan belajar mengajar di PKBM dengan peran sebagai motivator, fasilitator, dan katalisator diupayakan dapat memberikan daya penggerak yang mampu menciptakan kegairahan bagi warga belajar untuk mengikuti proses belajar mengajar di PKBM tersebut.

Sebagai motivator, fasilitator, dan katalisator di dalam pendidikan luar sekolah adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh seorang petugas PLS (Pamong Belajar, Penilik, maupun Petugas PLS lainnya) agar dapat mendorong dan menggerakkan kelompok sasaran (warga belajar) untuk ikut serta dalam kegiatan PLS dengan segala kerelaan hati untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mentalnya (Dirtentis, 1998, 7).

Seorang tutor dengan peran sebagai motivator, fasilitator, dan katalisator dalam pendidikan luar sekolah harus mampu mendorong dan menggerakkan warga belajar untuk ikut atau mau belajar dalam program Kejar Paket A Setara SD, Kejar Paket B Setara SLTP, Kejar Paket C, dan program-program PLS lainnya. Bentuk-bentuk sebagai motivator dalam pendidikan luar sekolah yang diperankan oleh tutor maupun pendamping yang lainnya antara lain adalah: mendorong gairah dan semangat belajar warga masyarakat, meningkatkan moral dan kepuasan belajar warga belajar, meningkatkan produktivitas kerja warga belajar, mempertahankan loyalitas dan kestabilan warga belajar, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi warga belajar, mengefektifkan pembentukan kelompok belajar, menciptakan suasana belajar yang baik, mengefektifkan kreatifitas dan rasa partisipasi warga belajar, meningkatkan kesejahteraan warga belajar, mempertinggi rasa tanggung jawab warga belajar, dan meningkatkan efisiensi belajar warga belajar (Dirtentis, 1998, 8).